



Alokasi Dana Hibah ke PHDI Mengacu Permendagri 32 Tahun 2011

MANGUPURA, NusaBali

Persoalan pemberian hibah kepada pengurus PHDI Badung yang sempat menjadi perbincangan hangat di media massa, ditanggapi pihak Pemkab Badung. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Gede Raka Yuda menyatakan hal itu sudah mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian hibah tersebut sudah sesuai prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, yakni dengan senantiasa memegang prinsip normatif, efektif efisien serta berorientasi kepada asas manfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam Permendagri ini juga secara rinci diuraikan terkait dengan bantuan hibah yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat," jelas Raka Yuda di Puspem Badung, Senin (20/4).

Raka Yuda menjelaskan bahwa dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 pada Bab III pasal 5 menyebutkan bahwa hibah dapat diberikan kepada: pemerintah,



Anak Agung Gede Raka Yuda SE

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tersebut diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang keagamaan, kesenian, adat istiadat, kesehatan, pendidikan termasuk di bidang perekonomian dan keolahragaan.

"Jadi pemberian hibah kepada PHDI yang merupakan lembaga pembinaan umat dalam rangka

peningkatan *sradha bhakti*. Ini merupakan salah satu yang memang dibolehkan," jelas Raka Yuda.

Dia mengungkapkan bahwa masalah pemberian hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri 32 Tahun 2011 tersebut sesungguhnya amat sangat terbuka diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, termasuk kepada organisasi sepanjang dilengkapi dengan proposal serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Badung.

Berkenaan dengan adanya dualisme PHDI, hal itu merupakan persoalan internal organisasi dan bukan menjadi kewenangan Bupati untuk menentukan legal dan ilegal.

Terkait keberadaan PHDI Badung, menurut Raka Yuda, ada historisnya di mana sebelumnya terdapat polemik sehingga terjadi stagnan dalam pembinaan umat, selanjutnya atas desakan bendesa adat di Badung agar pembinaan umat dapat berjalan, maka bendesa adat mengadakan paruman di Pura Petitenget. "Oleh karenanya terkait hibah kepada lembaga pembina umat ini demi kepentingan pembinaan umat dalam peningkatan *sradha bhaktinya*. Maka Pemkab juga dibenarkan memberikan bantuan hibah kepada PHDI Badung," tandasnya. @

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 2



DCK Siapkan DED Gedung Kesenian

MANGUPURA, NusaBali

Mimpi Bupati AA Gde Agung agar Badung memiliki gedung kesenian tampaknya bakal terwujud. Pemerintah mengalokasikan anggaran penyusunan detail engineering design (DED) di pos Dinas Cipta Karya (DCK) Badung untuk pembangunan kesenian representatif masuk dalam APBD induk tahun 2015 sekitar Rp 350.000.000 dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 349.863.250.

Meskipun begitu pembangunan gedung kesenian kemungkinan terbangun saat Gde Agung tak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Gumi Keris. Sebab pada Agustus mendatang, jabatan sebagai bupati berakhir.

Gedung kesenian ini konon bernama Graha Mangu Mandala. Sampai sekarang untuk lokasi pembangunan gedung kesenian masih belum diputuskan. Satu sisi pemerintah menginginkan berdiri di kompleks Puspem Badung, tetapi kalangan DPRD Badung menginginkan agar pembangunan gedung kesenian di luar puspem yakni di kawasan Abiansemal.

"Sekarang dalam proses tender untuk mendapat kon-

sultan perencanaan," kata Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Badung Ni Putu Dessy Dharmayanti, Senin (20/4). Gedung ini direncanakan bisa menampung 1.000 orang. Mengingat pemkab belum memiliki gedung yang cukup luas untuk menggelar event-event kesenian.

Untuk diketahui, Bupati Badung AA Gde Agung sempat mengutarakan keinginannya membangun gedung kesenian. Gde Agung mengatakan, balai budaya/wantilan di kawasan Puspem Badung sudah tidak layak untuk dipakai menggelar event-event besar. Karenanya sudah saatnya pemerintah mewujudkan pembangunan gedung baru khusus untuk pementasan kesenian. Sehingga tak perlu khawatir lagi pada saat musim hujan sekalipun.

Panglingsir Puri Ageng Mengwi itu mengaku juga memiliki keinginan agar Badung memiliki taman kota yang representatif. Bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Sayangnya, Gde Agung yang mengaku punya bayangan mengenai lokasi taman kota tersebut enggan menyebutkan lokasinya.  as

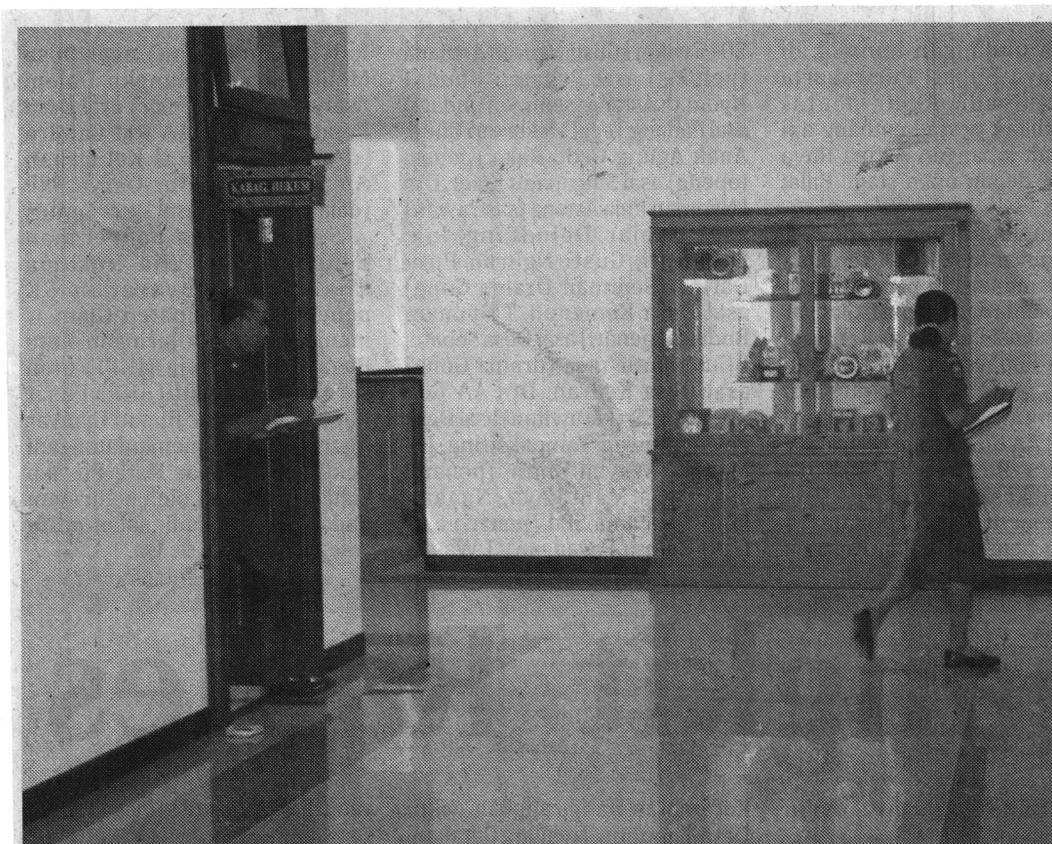
Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 2



Kejari Amankan SPJ PHDI Badung

★ Bagian Hukum Pemkab Badung
Digeledah Penyidik Kejari



BAGIAN luar dari ruangan Kabag Hukum Pemkab Badung tampak lengang setelah penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejari Denpasar, Senin (20/4).
● NUSABALI/ARI SISWANTO

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 5



Sambungan - -

**Tim penyidik
Kejari akan
menganalisa
dokumen-
dokumen yang
diamankan
sebelum
melakukan
pengeledahan di
PHDI Badung.**

DENPASAR, NusaBali

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali melakukan pengeledahan di Mangupraja (Puspem Badung) terkait dugaan penyelewengan dana hibah untuk Tirta Yatra ke India. Kali ini giliran Bagian Hukum Pemkab Badung yang digeledah dan mengamankan beberapa dokumen penting, di antaranya SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dari PHDI Badung.

Hal ini ditegaskan Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir usai melakukan peng-

geledahan pada, Senin (20/4). Ia mengatakan sudah melakukan pengeledahan pada Senin pagi sekitar pukul 08.30 Wita di Bagian Hukum Pemkab Badung untuk mencari dokumen terkait perjalanan Tirta Yatra ke India. Dari pengeledahan ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen. Syahrir Sagir sendiri yang memimpin timnya untuk lakukan pengeledahan.

"Yang paling penting, yaitu laporan SPJ PHDI Badung kepada Pemkab Badung," jelasnya. Selanjutnya, penyidik akan menganalisa dokumen-dokumen ini sebelum melakukan pengeledahan di PHDI Badung. Untuk sementara akan difokuskan untuk mencari apakah perjalanan Tirta Yatra ini fiktif atau tidak. Jika nantinya tidak ditemukan bukti perjalanan fiktif akan dikembangkan ke dugaan penyelewengan lainnya. "Karena ada dugaan anggaran ini masuk ke lembaga fiktif yang menjadi kerugian negara," paparnya.

Syahrir menegaskan akan berhati-hati menangani ka-

sus ini karena menyangkut pemuka agama. "Tapi kami berjanji akan menangani kasus ini secara serius," pungkasnya. Sementara saat NusaBali mencoba mengorek informasi terkait pengeledahan di Bagian Hukum Pemkab Badung, seorang Sekpri Kabag Hukum Komang Budi Argawa berkilah tidak tahu menahu terkait adanya perwakilan Kejari Denpasar tersebut.

"Tidak ada pak, tidak ada siapa-siapa sejak pagi," ucapnya. Bahkan, kata dia, Budi Argawa sejak pagi sudah meng-

hadiri rapat bersama Bupati Badung AA Gde Agung serta pejabat terkait lainnya. "Kalau bapak tidak ada di ruangan, dari pagi ada rapat bersama bapak bupati," ucap dia lagi.

Sementara itu, Budi Argawa saat coba dihubungi melalui sambungan telepon tak diangkat. Malah, ketika dihubungi sambungan telepon tiba-tiba terputus. Lalu, melalui pesan singkat (SMS), NusaBali mencoba mengonfirmasi kebenaran perwakilan Kejari Denpasar tersebut, namun hingga berita

ini diturunkan pesan singkat yang dikirim belum dibalas.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan soiritual Tirtayatra ke India ini masih dalam proses pengumpulan data dan informasi. Dalam kegiatan Tirtayatra ke India yang menelan anggaran hampir Rp 1 miliar itu diduga terdapat beberapa penyelewengan. Kegiatan spiritual Tirtayatra ke India tahun 2013 diselenggarakan Di-nas Kebudayaan Badung dengan menggunakan anggaran APBD.

Kasus ini berawal dari adanya proposal pada Dinas Kebudayaan Badung untuk kegiatan perjalanan spiritual Tirtayatra ke India tahun 2013 sebesar Rp 916 juta dan dinilai BPKP Provinsi Bali kurang akurat. Masalahnya, persetujuan proposal dengan dana hibah Rp 893.113.500 (Rp 893,11 juta) tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaannya. Selain soal dugaan penyimpangan dana, kasus ini juga diduga melibatkan lembaga PHDI yang kepengurusannya tidak diakui PHDI pusat. rez, as

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 5



Lidik Dugaan Korupsi Pupuk Kelar

★ Siap Gelar Perkara, Tunggu Calon Tersangka

Jika nantinya cukup bukti-bukti yang kuat mengarah kepada oknum rekanan, hingga ke oknum anggota dewan aktif, maka kasusnya berlanjut ke penyidikan, disertai turunnya surat perintah penyidikan.

AMLAPURA, NusaBali

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Karangasem dan diduga merugikan negara hingga ratusan juta pada tahun anggaran 2013 lalu, sudah kelar. Kini Kejaksaan Negeri Amlapura, tengah merancang gelar perkara yang akan menentukan apakah kasus berlanjut menunggu calon tersangka, atau terhenti. Namun besar kemungkinan kasus berlanjut, lantaran perkiraan kerugian negara mencapai sekitar Rp 400 juta, dari Rp 800 juta nilai pengadaan pupuk itu.

Berdasarkan data awal hasil penyelidikan, petugas Kejari Amlapura telah mengumpulkan keterangan dari 20 saksi-saksi di internal Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem. Kasi Pidana Khusus

Kejari Amlapura, Okto Aditya Tohari, seizin Kajari Amlapura Ivan Jaka, membeberkan hal ini di Amlapura, Senin (20/4).

Penyelidikan telah tuntas seminggu lalu, sehingga tinggal menunggu gelar perkara. Dalam gelar perkara itulah nanti akan dibebaskan, kronologis pengadaan pupuk, sejauh mana tindak pidana yang terjadi. "Secepatnya kita akan lakukan gelar perkara," kata Okto.

Jika nantinya cukup bukti-bukti yang kuat mengarah kepada oknum rekanan, hingga ke oknum anggota dewan aktif, maka kasusnya berlanjut ke penyidikan, disertai turunnya surat perintah penyidikan.

Sebelumnya Kajari Ivan Jaka menuturkan, pengadaan pupuk itu disiasati rekanan dengan dipecah lima, sehingga muncul penunjukan langsung. Padahal

pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta itu, mestinya lewat tender. Selain itu, lima perusahaan rekanan yang muncul, ternyata pemiliknya satu orang.

Rekanan tersebut kata Ivan Jaka, dari Karangasem, tidak tertutup kemungkinan menjerat oknum pejabat yang ada hubungannya dengan rekanan tersebut. Jika nantinya ada yang muncul sebagai tersangka, setidaknya telah ada kerugian negara secara resmi hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan), selaku auditor negara, untuk menguatkan dugaan korupsi itu.

Uniknya lagi, penggunaan dana Rp 800 juta itu, terlebih dahulu tertuang di APBD 2013, berupa pengadaan pupuk, untuk beberapa kelompok tani. Setelah dana muncul di APBD barulah dimohon melalui proposal. "Mestinya pengajuan melalui proposal dulu atas dasar usulan itulah dituangkan dalam APBD," tambahnya.

Kasus pengadaan pupuk ini, katanya mirip dengan pengadaan bibit di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Karangasem tahun 2013, sehingga berekses hukum, akibatnya menjerat dua terpidana. **k16**

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 8



Tanah 12 Ha, Aset Badung di Terminal Mengwi

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung kerja maraton menyelesaikan pendataan aset di Terminal Mengwi. Pendataan dilakukan menyusul pengambilalihan terminal bertipe A itu oleh pemerintah pusat. Dari pendataan awal, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Badung, mengklaim aset Pemkab Badung di Terminal Mengwi berupa tanah seluas 12 hektare.

"Tanah seluas 12 hektare itu semua aset Badung. Kalau bangunannya baru bantuan pusat. Personel juga semua milik kami (Pemkab Badung)," ungkap Kepala Dishubkominfo Badung I Wayan Weda Dharmaja, Senin (20/4), di Puspem Badung.

Menurut Weda, pendataan aset Terminal Mengwi dilakukan secara menyeluruh meliputi personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D). Yakni mulai dari aset tanah, bangunan, sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM). "Iya, sekarang kami sedang pendataan aset-aset. Bahkan sekarang sudah hampir rampung," tegasnya.

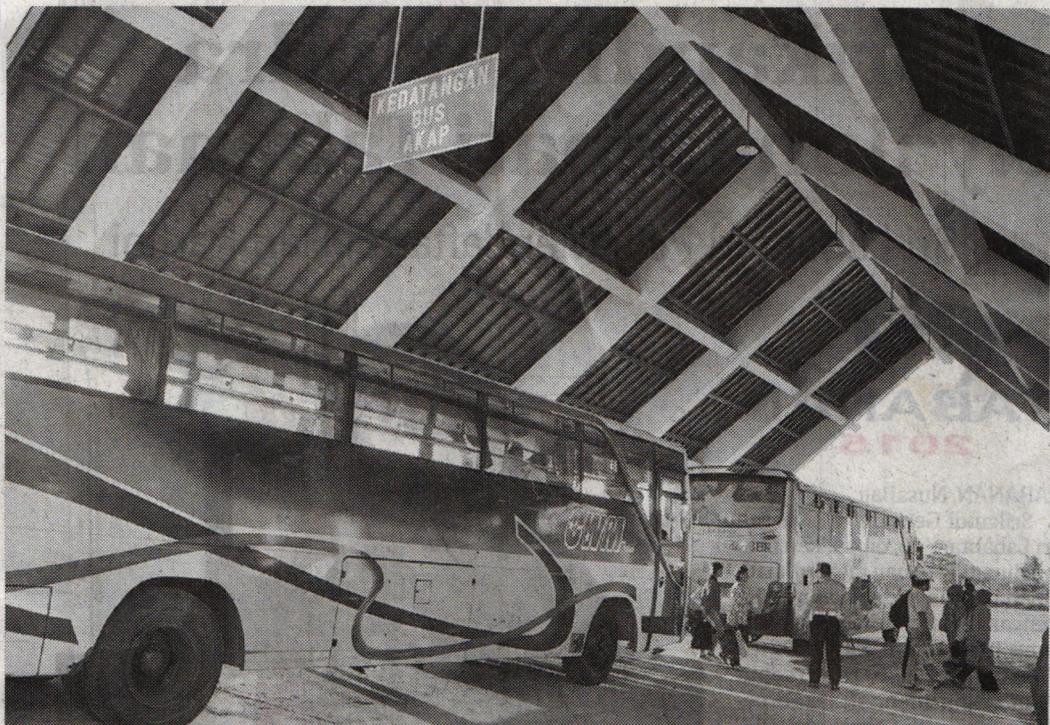
Untuk aset tanah, begitu juga dengan SDM, semua direkrut Pemkab Badung. Bahkan ada PNS Badung yang ditugaskan di sana. Tidak saja

mengenai operasional terminal, mantan Camat Abiansemal ini mengaku selama ini semua dibebankan ke Badung. Termasuk untuk gaji pegawai kontrak. Tetapi, bila kemudian pemerintah pusat mengambilalih pengelolaan, tentunya kewenangan secara otomatis akan berpindah kepada pusat. "Kalau itu dikelola pusat, otomatis jadi urusan pusat. Kecuali yang berstatus PNS," tegas Weda.

Namun sebelum resmi diambilalih oleh pusat, untuk mengelola Terminal Mengwi masih dibebankan kepada Pemkab Badung. "Sebelum diserahkan dan ada tanda tangan MoU, terminal masih kami yang kelola," imbuhnya.

Pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) pengambilalihan pengelolaan Terminal Mengwi dari Badung ke pusat. Pengambilalihan pengelolaan Terminal Mengwi mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski demikian, pemerintah membantah pengambilalihan ada hubungannya dengan persoalan belum maksimalnya Terminal Mengwi sekarang ini.

"Kami berharap setelah Terminal Mengwi dikelola pusat, masalah yang ada di terminal saat ini bisa teratasi," harap Weda. as



SEJUMLAH penumpang turun dari bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Tipe A Mengwi, Senin (20/4). Pengelolaan Terminal Mengwi akan segera diambilalih oleh pemerintah pusat. • NUSABALI/YUDA

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 2